

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada fungsi model 1, bahwa instrumen fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah di gunakan untuk belanja pembangunan sehingga meningkatkan pendapatan lalu meningkatkan perekonomian. Tetapi saat dalam jangka panjangnya pengeluaran pemerintah tidak lagi menjadi yang utama untuk pembangunan ekonomi karena peran swasta yang bergerak dan belanja pemerintah di gunakan untuk belanja sosial, sehingga hasil penelitian menunjukkan yang juga sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap PDRB di Provinsi Lampung.
2. Sedangkan penerimaan pajak dari hasil penelitian, berpengaruh secara positif terhadap PDRB yang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Karena pajak di Provinsi Lampung bersifat pajak daerah sehingga tidak mempengaruhi PDRB secara langsung.
3. Pada fungsi model 2, Pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang sama-sama berpengaruh secara negatif terhadap inflasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori *demand pull inflation*. Mungkin, di karenakan belanja

pemerintah terletak pada belanja rutin yang mana pemerintah hanya melihat dari sisi konsumsi masyarakatnya saja sehingga tidak terjadi *multiplier effect* yang juga akan mempengaruhi investasi. Dengan demikian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara positif terhadap inflasi.

4. Dari sisi penerimaan, pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek sama-sama berpengaruh positif terhadap inflasi. Dimana apabila adanya kenaikan pajak akan meningkatkan biaya produksi serta akan meningkatkan inflasi yang juga sesuai dengan teori *cosh push inflation*.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah daerah perlunya tata kelola anggaran daerah yang baik. Pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai dampak langsung ke pertumbuhan ekonomi atau PDRB baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pengeluaran sebaiknya dilakukan untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga tidak membebani anggaran pemerintah untuk hal yang kurang produktif.
2. Perlunya kebijakan fiskal yang pro dunia usaha, sehingga dapat memacu perekonomian yang ada di daerah.
3. Belanja pembangunan yang ada di daerah sebaiknya di perhatikan oleh pemerintah daerah, agar pembangunan ekonomi bisa benar-benar di rasakan oleh masyarakat dan merata di setiap daerah/Provinsi. Sehingga dapat meningkatkan investasi dan memudahkan setiap daerah untuk berkembang. Jangan hanya daerah ibu kota yang terus mengalami kemajuan dalam pembangunan sedangkan daerah lain tertinggal.